

## STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI PENGGALIAN POTENSI EKONOMI DAERAH DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Neelam Noeridha<sup>1(a)</sup>, Nadia<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

<sup>a)</sup>[neelamnoer26@email.com](mailto:neelamnoer26@email.com)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

20-06-2023

Diterbitkan Online:

30-06-2023

#### Kata Kunci:

Provinsi Kepulauan Riau,

Pendapatan Asli Daerah,

Potensi Ekonomi

#### Keywords:

Province of Riau Islands,  
Regional Original Revenue,  
Economic Potential

#### Corresponding Author:

[neelamnoer26@email.com](mailto:neelamnoer26@email.com)

### ABSTRAK

Letak geografis yang sangat strategis disertai dengan potensi sumber daya ekonomi yang besar merupakan faktor pendukung bagi perekonomian Kepulauan Riau. Namun, kelebihan tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan Pendapatan Daerah Kepulauan Riau terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya, dengan menggunakan metode studi kepustakaan terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepulauan Riau memiliki potensi ekonomi daerah yang sangat melimpah, sehingga jika dimanfaatkan secara tepat akan memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penggalan Potensi Ekonomi Kepulauan Riau dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbasis Potensi Ekonomi Daerah dan berfokus pada sektor ekonomi yang unggul serta sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan.

### ABSTRACT

The strategic geographic location accompanied by the potential of great economic resources is a supporting factor for the Riau Islands economy. However, the advantage has not been utilized optimally by the Riau Islands Provincial Government. The low contribution of the original regional income (PAD) on APBD of the Riau Islands Province shows the high level of reference in the reference of the Riau Islands regard to the balance fund from the central government. The purpose of this study is to learn the strategy of the Government of Riau Islands Province to increase the original revenue, using the library study method of literature relating to the research issues. The results showed that the Riau Islands had a very abundant economic potential, so if ultimately utilized will have a positive impact on the increase in the original revenue (PAD). The Riau Islands Provincial Government needs to optimize the original revenue with the development of the economic potential of the Riau Islands by establishing local-based operating business (BUMD) based on local economic potential and focused on superior economic sectors and potential economic sectors to be developed.

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v2i2.100>

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia memberikan konsekuensi berupa adanya penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, termasuk di dalam pengelolaan sektor keuangan dengan tujuan untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Desentralisasi keuangan memberikan ruang kepada setiap daerah untuk menggali sumber-sumber pendapatan di daerahnya masing-masing. Adapun instrumen desentralisasi keuangan daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu rencana keuangan tahunan dari Pemerintah Daerah yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan berlaku mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Melalui APBD, pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan pemerataan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dan potensi yang tersedia pada daerah. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pembangunan.

Penyelenggaraan otonomi daerah pada Provinsi Kepulauan Riau didasarkan atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Sejak saat itu, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kepulauan Riau secara otomatis telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemerataan pembangunan tidak terlepas dari sumber pembiayaan, yaitu APBD. APBD telah menjadi alat bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjalankan otonomi daerah secara bertanggung jawab kepada masyarakat.

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi Kepulauan di Indonesia dengan letak geografis yang sangat strategis, karena terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna (Laut Cina Selatan) dan berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja yang merupakan pusat perdagangan dunia. Sebagai provinsi yang didominasi oleh perairan, maka Kepulauan Riau didukung oleh sumber daya yang sangat potensial, terutama sumber daya kelautan dan perikanan yang meliputi ekosistem mangrove, terumbu karang, hasil budidaya perikanan, ikan dan udang air payau, ikan air tawar, dan jenis-jenis biota laut lainnya.

**Tabel 1. Potensi Perikanan Tangkap di Kepulauan Riau**

Jenis Sumber Daya Ikan (SDI)	Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan (ton/tahun)	Estimasi Tingkat Pemanfaatan (ton)	Peluang Pengembangan Produksi (ton)
Ikan Pelagis	559,828	84,060	475,768
Ikan Demersal	272,594	75,435	197,159
Ikan Karang	17,562	13,568	3,994
<b>Total</b>	<b>849,984</b>	<b>173,063</b>	<b>676,921</b>

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (2023)

**Tabel 2. Potensi Perikanan Budidaya di Kepulauan Riau**

Kabupaten/ Kota	Luas Daratan (ha)	Panjang Garis Pantai (km)	Budidaya di Laut (ha)		Budidaya di Darat (ha)	
			Pesisir	Laut Lepas	Air Payau	Air Tawar
Karimun	287.320	642	10.211	47.232	190	65
Batam	211.772	172	10.710	50.422	288	150
Natuna	205.845	460	6.021	20.393	507	22
Bintan	194.613	435	6.684	37.517	250	389
Tanjungpinang	77.027	53	-	-	-	60

Kabupaten/ Kota	Luas Daratan (ha)	Panjang Garis Pantai (km)	Budidaya di Laut (ha)		Budidaya di Darat (ha)	
			Pesisir	Laut Lepas	Air Payau	Air Tawar
Kep. Anambas	59.014	132	1.993	19.005	-	50
Lingga	23.920	473	19.054	226.538	828	83
<b>Jumlah</b>	<b>1.059.511</b>	<b>2.368</b>	<b>54.672</b>	<b>401.108</b>	<b>2.063</b>	<b>819</b>

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 (2023)

Dengan letak geografis tersebut, maka tentunya hal ini menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat digunakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui pemanfaatan berbagai potensi sumber

daya yang tersedia, seperti sumber pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Potensi sumber daya di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan pada Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3. Potensi Pertanian di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2022**

Kabupaten/Kota	Produksi Padi (ton)			Produksi Beras (ton)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Natuna	408,65	299,02	354,97	232,63	171,12	203,13
Lingga	228,76	282,12	118,16	130,23	161,44	67,62
Karimun	59,89	80,94	-	34,09	46,32	-
Bintan	53,11	43,40	28,94	30,24	24,84	16,56
Kepulauan Anambas	102,13	149,53	87,61	58,12	85,57	50,13
Batam	-	-	-	-	-	-
Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>852,54</b>	<b>855,01</b>	<b>589,68</b>	<b>485,31</b>	<b>489,29</b>	<b>337,44</b>

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

**Tabel 4. Potensi Perkebunan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020-2022**

Kabupaten/ Kota	Bayam (qui)			Kacang Panjang (qui)			Kangkung (qui)			Ketimun (qui)		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Natuna	43	183	141	37	250	306	63	217	138	46	483	585
Lingga	42	1.438	587	48	12.689	6.928	46	8.315	4.214	59	970	974
Karimun	54	1.153	1.110	56	825	657	58	1.241	1.282	40	1.056	783
Bintan	79	4.942	7.241	68	6.896	17.338	93	7.047	12.891	53	5.727	17.348
Kepulauan Anambas	10	52	57	9	55	42	11	104	126	5	208	113
Batam	332	17.578	18.089	238	18.732	16.329	308	16.980	16.692	225	22.100	19.064
Tanjungpinang	4	265	468	5	83	46	5	505	1.340	5	79	39
<b>Jumlah</b>	<b>565</b>	<b>25.612</b>	<b>27.693</b>	<b>460</b>	<b>39.540</b>	<b>41.648</b>	<b>584</b>	<b>34.409</b>	<b>36.683</b>	<b>432</b>	<b>30.622</b>	<b>38.906</b>

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

**Tabel 5. Potensi Kehutanan di Provinsi Kepulauan Riau**

Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan					
	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat dikonversi	Luas Hutan dan Perairan
Natuna	12.250	-	34.204	15.334	50.873	200.452
Lingga	31.968	-	49.182	17.191	11.183	221.441
Karimun	8.388	-	15.719	4.465	2.083	93.146
Bintan	19.407	1.172	6.053	17.886	3.388	131.723
Kepulauan Anambas	3.645	-	1.260	17.614	938	63.052
Batam	20.366	3.553	9.145	2.360	11.506	103.271
Tanjungpinang	368	10	1.401	433	1	14.979
<b>Jumlah</b>	<b>96.392</b>	<b>4.735</b>	<b>116.964</b>	<b>75.282</b>	<b>79.972</b>	<b>828.064</b>

Sumber: BPS Kepulauan Riau (2023)

**Tabel 6. Potensi Peternakan di Kepulauan Riau**

Kabupaten/ Kota	Produksi Daging Ternak (kg)						Produksi Daging Unggas (kg)					
	Sapi			Kambing			Ayam Kampung			Itik dan Itik Manila		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Natuna	218.784	245.406	209.345,03	670	670	1.328,25	81.658	68.646,27	68.663,21	2.241	1.717,71	1.712,04
Lingga	48.888	61.956	62.682,50	4.605	6.047	3.693,80	77.467	74.961,04	74.190,27	1.053	945,73	896,61
Karimun	120.283	133.110	152.712,97	13.283	13.283	17.710	15.586	16.426,41	17.743,11	4.593	4.797,21	4.793,80
Bintan	57.842	60.746	85.190,12	7.109	7.109	7.109,30	203.399	141.023,19	141.023,19	6.249	6.249,10	6.249,10
Kepulauan Anambas	124.397	66.555	121.734,74	266	266	556,60	24.175	24.388,98	24.399,76	954	821,37	877,80
Batam	1.288.259	1.288.259	505.816,33	230.116	230.116	243.512,50	996.288	996.287,60	996.287,60	3.919	3.762	3.762
Tanjungpinang	404.653	465.883	252.908,16	33.649	35.420	7.754,45	7.183	8.144,29	18.897,34	3.879	4.753,98	4.788,47
<b>Jumlah</b>	<b>2.263.105</b>	<b>2.321.915</b>	<b>1.390.389,85</b>	<b>289.698</b>	<b>292.911</b>	<b>281.664,90</b>	<b>1.495.755</b>	<b>1.329.877,78</b>	<b>1.341.204,48</b>	<b>22.888</b>	<b>23.047,10</b>	<b>23.079,82</b>

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

Meskipun demikian, hingga saat ini Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau masih sangat bergantung kepada Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Ketergantungan Pendapatan Daerah terhadap Dana Bantuan dari Pemerintah Pusat dapat

terlihat dari APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020-2023. Berdasarkan APBD tersebut, diketahui pendapatan terbesar pada Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau masih didominasi oleh Dana Transfer (Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat. Sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

**Tabel 7. Pendapatan Daerah pada APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020-2023**

No	Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Dana Perimbangan	Pendapatan Lain yang Sah
1.	2020	Rp 3.882.832.227.023,00	Rp 1.303.321.350.464,00	Rp 2.539.569.841.559,00	Rp 39.941.035.000,00
2.	2021	Rp 3.701.942.728.300,00	Rp 1.352.645.560.200,00	Rp 2.348.013.168.100,00	Rp 1.284.000.000,00
3.	2022	Rp 3.480.323.080.509,00	Rp 1.348.493.617.641,00	Rp 2.130.568.412.868,00	Rp 1.261.050.000
4.	2023	Rp 4.019.425.727.463,00	Rp 1.518.211.727.009,00	Rp 2.499.889.897.954,0	Rp 1.324.102.500,00

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar Pendapatan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau didominasi oleh dana bantuan

dari Pemerintah Pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sedangkan Pendapatan Daerah yang bersumber

dari PAD dinilai masih sangat rendah. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan tujuan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, dimana dengan harapan agar setiap daerah dapat menjadi lebih mandiri dan proaktif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga tidak adanya ketergantungan yang signifikan terhadap Pemerintah Pusat.

Beberapa studi tentang Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah telah banyak dilakukan di Indonesia (Nasution & Rahayu, 2023; Mebri et al., 2022; Fauni et al., 2021; Pratama et al., 2021; Hadi, 2020; Trisnawati, 2020; Widiastuti & Risandewi, 2020; Novianti et al., 2020; Sandi et al., 2020; Syapsan, 2019; Nilawati, 2019). Nasution & Rahayu (2023) mengidentifikasi bahwa peningkatan PAD Kabupaten Lampung Selatan diprioritaskan melalui pemungutan pajak yang dilakukan dengan pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP), penyediaan layanan pajak berjalan/*mobile*, serta pemasangan alat penghitung pajak pada restoran dan tempat makan. Mebri et al., (2022) mengidentifikasi bahwa peningkatan PAD Kota Jayapura dilakukan melalui pengembangan sektor pariwisata, mengingat potensi pariwisata di Kota Jayapura yang sangat besar dan didominasi oleh objek wisata alam pantai. Fauni et al., (2021) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa strategi peningkatan PAD Kota Banjarmasin dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2).

Studi yang dilakukan oleh Pratama et al., (2021) menunjukkan bahwa peningkatan PAD Kota Ternate dilakukan melalui pengembangan sektor pariwisata, mengingat Ternate sebagai salah satu kota yang berada di timur Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi wisata yang berlimpah. Hadi (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa strategi peningkatan PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Trisnawati (2020) mengemukakan bahwa peningkatan PAD Kabupaten Subang dilakukan melalui pengelolaan Inventaris Milik Daerah yang dibeli dari hasil pajak dan retribusi daerah. Strategi peningkatan PAD Kabupaten Subang dilakukan dengan menyewakan alat berat pada UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang kepada pihak ketiga untuk menghasilkan pemasukan bagi keuangan daerah. Sedangkan Widiastuti & Risandewi

(2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan PAD Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui pemberdayaan Aset Daerah.

Selanjutnya, Novianti et al., (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa strategi peningkatan PAD Kabupaten Wonosobo dilakukan melalui retribusi sektor pariwisata, mengingat Kabupaten Wonosobo memiliki potensi yang besar pada sektor pariwisata terutama pada objek wisata Dataran Tinggi Dieng. Begitu juga dengan studi yang dilakukan oleh Sandi et al., (2020), peningkatan PAD Kota Tanjungpinang dilakukan melalui pengembangan sektor pariwisata yang bersumber dari Pajak Sarana dan Prasarana Pendukung Kepariwisata, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Tempat Hiburan, serta Pajak Agen Penyelenggara Wisata *Tours* dan *Travel*. Studi yang dilakukan oleh Syapsan (2019) mengemukakan bahwa peningkatan PAD Provinsi Riau, khususnya di Kota Dumai, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Bengkalis dilakukan melalui Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan Nilawati (2019) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa peningkatan PAD Kabupaten Gunungkidul dilakukan melalui pengembangan sektor pariwisata dengan bertumpu pada pemungutan retribusi.

Penelitian terkait Strategi Peningkatan PAD di Indonesia sebagian besar masih difokuskan melalui pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, pengembangan sektor pariwisata, dan pemanfaatan aset atau inventaris milik daerah. Namun, masih terbatasnya pembahasan terkait pengelolaan Potensi Ekonomi Daerah dalam upaya meningkatkan Pendapatan Daerah. Setiap daerah tentunya memiliki potensi sumber daya tersendiri yang bisa digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan (*income*) dan penunjang ekonomi bagi daerah dalam menjalankan pemerintahannya. Idealnya setiap daerah memiliki otonomi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui pemanfaatan potensi Sumber Daya Ekonomi yang dimilikinya. Begitu juga dengan Kepulauan Riau.

Kepulauan Riau memiliki berbagai potensi Sumber Daya Ekonomi dengan letak wilayah yang strategis. Namun hingga saat ini, Provinsi Kepulauan Riau masih belum juga menunjukkan keberhasilan dan perubahan yang berarti dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Ekonomi tersebut. Permasalahan masih rendahnya kontribusi PAD terhadap

Pendapatan Daerah Kepulauan Riau terjadi karena belum optimalnya penggalan potensi Sumber Daya Ekonomi dan masih terbatasnya kemampuan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam memanfaatkan potensi sumber daya tersebut untuk dijadikan sebagai sumber Pendapatan Daerah. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah *untuk mengetahui strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kepulauan Riau.*

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian, penulis menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui berbagai sumber yang telah tersedia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan metode Studi Kepustakaan melalui data dan informasi dari Buku, Jurnal Penelitian, Peraturan Perundang-Undangan, Rencana Kerja Daerah, Laporan Kerja Instansi Pemerintah, Data BPS, dan media elektronik (situs internet). Sedangkan analisis data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan model dari Miles dan Huberman yang terdiri

dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memilah data-data penting yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk uraian teks dan tabel. Sedangkan tahap akhir penelitian dilakukan dengan membuat kesimpulan terkait data hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Potensi Ekonomi Provinsi Kepulauan Riau

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang secara geografis terletak pada posisi sangat strategis dengan berbatasan langsung pada beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Kamboja, dan Vietnam. Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas daratan sebesar 8.201,72 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 5 Kabupaten dan 2 Kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang (Sebagai Ibu Kota Provinsi). Luas wilayah daratan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 8. Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (Km <sup>2</sup> )
1	Kabupaten Lingga	2.266,77 Km <sup>2</sup>
2	Kabupaten Natuna	2.009,04 Km <sup>2</sup>
3	Kabupaten Bintan	1.318,21 Km <sup>2</sup>
4	Kota Batam	960,25 Km <sup>2</sup>
5	Kabupaten Karimun	912,75 Km <sup>2</sup>
6	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14 Km <sup>2</sup>
7	Kota Tanjungpinang	144,56 Km <sup>2</sup>
<b>Total</b>		<b>8.201,72 Km<sup>2</sup></b>

*Sumber: RKPDP Provinsi Kepulauan Riau (2022)*

Sedangkan untuk luas wilayah lautan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 adalah sebesar

417.012,97 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah lautan Provinsi Kepulauan Riau tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 9. Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau**

No	Kabupaten/Kota	Luas Lautan (Km <sup>2</sup> )
1	Kabupaten Natuna	216.113,42 Km <sup>2</sup>
2	Kabupaten Bintan	102.964,08 Km <sup>2</sup>
3	Kabupaten Kepulauan Anambas	46.074,00 Km <sup>2</sup>
4	Kabupaten Lingga	43.339,00 Km <sup>2</sup>
5	Kabupaten Karimun	4.698,09 Km <sup>2</sup>
6	Kota Batam	3.675,25 Km <sup>2</sup>
7	Kota Tanjungpinang	149,13 Km <sup>2</sup>
<b>Total</b>		<b>417.012,97 Km<sup>2</sup></b>

Sumber: RKPD Provinsi Kepulauan Riau (2022)

Oleh karena itu, 95% wilayah Kepulauan Riau merupakan lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil yang mengakibatkan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Provinsi Kepulauan Riau sebagai provinsi kepulauan memiliki 4 Potensi Ekonomi Kemaritim yang dapat menjadi modal dasar dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Jasa Transportasi Pelayaran dan Perdagangan, Wisata Bahari/Maritim, dan Energi Berkelanjutan.

#### Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Dengan luas wilayah yang 95% terdiri dari lautan, Kepulauan Riau memiliki Sumber Daya Alam dari Kelautan dan Perikanan yang sangat besar dan melimpah. Kondisi ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bentuk Potensi Ekonomi Daerahnya, terutama dalam upaya peningkatan PAD. Salah satu Sumber Daya Kelautan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau adalah Ekosistem Terumbu Karang.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki Ekosistem Terumbu Karang yang potensial

untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata. Beberapa lokasi yang memiliki Ekosistem Terumbu Karang yang indah disertai adanya jenis-jenis ikan karang yang cukup banyak dengan bentuk dan warna yang menarik, yaitu: Natuna Bagian Selatan (Selat Lampa) tepatnya di Pulau Burung dan Pulau Setahi, Natuna Bagian Utara (Teluk Buton) tepatnya di Pulau Panjang dan Pulau Pendek, Natuna Bagian Timur tepatnya Selat Senua dan Pulau Senua, serta Natuna Bagian Timur Laut tepatnya di Pulau Sahi.

Sedangkan untuk potensi Sumber Daya Perikanan yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau, secara garis besar terdiri dari Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan Produk Perikanan, Industri Bioteknologi Kelautan, Industri Sumber Daya Laut-Dalam, Pemanfaatan Muatan Barang Kapal Tenggelam, Wisata Bahari, Potensi Mangrove, serta Terumbu Karang. Komoditas hasil Kelautan dan Perikanan yang dikembangkan merupakan komoditas unggulan yang terdiri dari rumput laut (*seaweed*), ikan, biota laut ekonomis tinggi, serta komoditi hasil budidaya perikanan.

Adapun jenis Sumber Daya Ikan yang terdapat di perairan laut Kepulauan Riau dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

**Tabel 10. Jenis Sumber Daya Ikan di Kepulauan Riau**

No	Kelompok Sumber Daya Ikan	Jenis Ikan
1	Sumber Daya Ikan Pelagis	Tongkol, Tenggiri, Kembung, Layang, Teri
2	Sumber Daya Ikan Demersal	Kakap Merah, Kurisi, Beloso, Bawal
3	Sumber Daya Ikan Karang	Kerapu, Baronang, Napoleon
4	Sumber Daya Molusca	Cumi-cumi, Sotong
5	Sumber Daya Krustasea dan Udang	Kepiting, Rajungan, dan Udang

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

Beberapa komponen dari Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang tersedia tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal untuk menjadi Potensi Ekonomi Daerah

Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan jumlah Sumber Daya yang tersedia cukup melimpah, sehingga jika dimanfaatkan dan didayagunakan

dengan tepat maka akan memberikan dampak positif terhadap PAD Provinsi Kepulauan Riau.

### **Jasa Transportasi Pelayaran dan Perdagangan**

Berdasarkan posisi geografisnya yang terbentang dari Selat Malaka hingga Laut Natuna (Cina Selatan) dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Kamboja sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peranan yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Peran pelabuhan dan jasa transportasi laut sangat diperlukan untuk mendukung proses perdagangan internasional, terutama untuk ekspor dan impor barang melalui penyediaan terminal barang dan pelayanan bongkar muat.

Dalam upaya untuk memanfaatkan Potensi Ekonomi yang berkembang melalui lalu lintas pelayaran di Selat Malaka, maka Kepulauan Riau telah menetapkan sebagian besar daerah perairannya untuk areal Labuh Jangkar dengan titik Labuh Jangkar di perairan Batam dan sekitarnya berjumlah 7 titik. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki peranan penting pada proses penunjukkan operator Pelabuhan dan operasionalisasi kegiatan Labuh Jangkar sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB Jasa Transportasi Laut yang berlaku pada Kementerian Perhubungan di Wilayah tertentu di Perairan yang ditetapkan sebagai Pelabuhan di Provinsi Kepulauan Riau.

Selain melalui Labuh Jangkar, kondisi perdagangan internasional yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau juga didukung oleh peranan pelabuhan dan jasa transportasi laut. Beberapa pelabuhan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau adalah Pelabuhan Kabil, Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Tanjung Uban, dan pelabuhan lainnya yang melayani jasa transportasi baik penumpang maupun barang. Salah satu pelabuhan laut yang sangat strategis di Provinsi Kepulauan Riau adalah Pelabuhan Tanjung Balai Karimun yang terletak di Pulau Karimun.

Pelabuhan Tanjung Balai Karimun merupakan pintu gerbang perekonomian daerah di Kepulauan Riau yang menjadi pertemuan transportasi inter dan antar-moda, khususnya yang menyangkut arus kegiatan keluar-masuk kapal, barang, dan penumpang. Pelabuhan

Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu pintu masuk menuju ke Pulau Karimun dan merupakan pelabuhan internasional, khususnya dari Singapura dan Kukup Malaysia. Ditinjau dari segi geografis, pelabuhan Tanjung Balai Karimun mempunyai peranan yang penting jika ditinjau dari aktivitas ekonomi. Pelabuhan Tanjung Balai Karimun sebagai pintu gerbang utama secara tidak langsung mampu untuk membangkitkan perekonomian masyarakat, hal ini terlihat dari kelancaran transportasi laut di Pulau Karimun dengan banyaknya rute pelayaran yang dibuka.

Lokasi yang strategis tersebut membuat pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Riau menjadi diperhitungkan. Berkembangnya perusahaan pelayaran angkutan laut, perusahaan bongkar muat, dan pariwisata menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Riau memiliki pengaruh penting dalam sektor ekonomi, sosial, politik, dan budaya, terutama dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah Kepulauan Riau.

### **Wisata Bahari/Maritim**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam memacu perekonomian di Indonesia. Potensi yang dimiliki oleh pariwisata ini sangat beragam, mulai dari potensi fisik, sosial, maupun budaya. Pembangunan kepariwisataan yang terarah dapat dijadikan sebagai sektor andalan yang mampu menjadi peluang kerja, PAD, dan tentunya menjadi salah satu penghasil devisa negara.

Potensi Sumber Daya Alam dan budaya yang berlimpah serta beranekaragam dengan keunikan dan ciri khas tersendiri dapat menjadi kesempatan besar bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata di Kepulauan Riau. Dengan posisi geografis Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, tentunya memiliki peluang besar dalam menarik wisatawan asing untuk datang dan berkunjung ke berbagai destinasi wisata yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau.

Adanya Ekosistem Terumbu Karang yang indah serta Pantai dan Pulau Kecil yang tersebar di beberapa lokasi pada Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata, dengan titik lokasi sebagai berikut:

**Tabel 11. Titik Lokasi Wisata Ekosistem Terumbu Karang**

No	Ekosistem Terumbu Karang	
	Kawasan Wisata Bahari	Kawasan Wisata Rekreasi Pantai
1	Kabupaten Natuna	Kabupaten Natuna
2	Kabupaten Lingga	Kabupaten Kepulauan Anambas
3	Kota Batam	Kabupaten Karimun
4	Kabupaten Bintan	Kabupaten Lingga
5	Kabupaten Kepulauan Anambas	Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
6	-	Kabupaten Bintan

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

Salah satu primadona potensi wisata di Kepulauan Riau terletak di Pulau Bintan. Pulau Bintan telah menjadi salah satu gerbang wisata di Indonesia, terkhususnya di Kepulauan Riau. Adanya potensi besar pada bidang bahari, budaya, sejarah, edukasi, dan religi dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Bintan. Selain Pulau Bintan, terdapat beberapa destinasi wisata unggulan di Kepulauan Riau, seperti Pulau Penyengat yang menjadi pusat destinasi wisata religi di Kepulauan Riau, *Treasure Bay*, Vihara 1.000 Wajah (Vihara Ksitigarbha Bodhisattva), Danau Biru Kawal, Pantai Senggiling, Desa Wisata E kang, Bintan Mangrove, dan masih banyak lainnya. Jika seluruh objek wisata yang

berada di Provinsi Kepulauan Riau dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, maka akan menjadi Potensi Ekonomi Daerah yang dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kepulauan Riau.

### Energi Berkelanjutan

Berdasarkan kondisi geomorfologinya, Kepulauan Riau merupakan provinsi yang termasuk kedalam bagian kontinental Paparan Sunda (bagian dari kerak Benua Asia). Dengan kondisi tersebut, maka Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi Sumber Daya Alam dan Energi yang cukup besar dan bervariasi. Potensi Sumber Daya Alam dan Energi yang dimiliki oleh Kepulauan Riau dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 12. Bahan Galian dan Batuan di Kepulauan Riau**

Bahan Galian			Batuan					
Berdasarkan Jenis			Berdasarkan Jenis					
A	B	C	Batuan Ubahan	Batuan Gunung Api	Batuan Terobosan	Batuan Sedimen	Batuan Alluvium Tua	Batuan Alluvium Muda
Minyak Bumi	Timah	Granit	Mika Genesis	Tuf	Granit Muskovit	Serpit Batu Pasir	Lempung	Lumpur
Gas Alam	Bauksit	Pasir	Meta Batu Lanau	Tuf Litik	-	Metagabro	Pasir Kerikil	Lanau
-	Pasir Besi	Kuarsa	-	Batu Pasir Tufan	-	-	-	Karakal
	Lokasi:		Bagian Timur Kepulauan Riau		Pulau Kundur Bagian Timur	Pulau Batam, Bintan, dan Euru	Tersebar di beberapa wilayah Kepulauan Riau	

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

**Tabel 13. Tanah dan Pertambangan di Kepulauan Riau**

Tanah	Lokasi Tanah	Pertambangan Batuan dan Logam	Lokasi Tambang
Tanah Organosol	Kabupaten Karimun (Kecamatan Moro), Kabupaten Natuna, Pulau Rempang, dan Pulau Galang.	Bauksit	Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga
Tanah Glei Humus	Tersebar di beberapa wilayah Kepulauan Riau	Timah	Kabupaten Karimun dan Kabupaten Lingga

Tanah	Lokasi Tanah	Pertambangan Batuan dan Logam	Lokasi Tambang
Tanah Podsolik Merah Kuning	Tersebar di beberapa wilayah Kepulauan Riau	Biji Besi	Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas
Tanah Latosol	Kabupaten Natuna, Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan Beberapa Pulau di Kecamatan Moro.	Granit	Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Kepulauan Anambas
Tanah Alluvial	Pulau Karimun, Pulau Kundur, dan Pulau Lainnya di Kepulauan Riau.	Pasir Darat dan Pasir Laut	Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga

*Sumber: Olahan Peneliti (2023)*

Pengembangan pabrik pengolahan dan pemurnian bahan tambang memiliki peluang yang sangat besar bagi Kepulauan Riau. Sebagai penghasil bauksit, saat ini Indonesia belum memiliki pabrik pengolahan bauksit, sehingga seluruh biji bauksit harus di ekspor ke luar negeri terlebih dahulu. Adapun jumlah perusahaan penambangan bauksit yang memiliki IUP di wilayah Kepulauan Riau hanya terdiri dari 32 perusahaan, berbanding terbalik dengan jumlah Sumber Daya Bauksit di Kepulauan Riau yang diperkirakan mencapai 180,97 juta ton, dengan daerah Sumber Daya Bauksit terbesar berada di Kabupaten Lingga, yaitu sekitar 168,96 juta ton dan sisanya tersebar di 4 wilayah lainnya dengan jumlah yang kecil.

Adanya cadangan potensi tambang yang cukup besar di Kepulauan Riau merupakan peluang investasi dan Potensi Ekonomi Daerah secara berkelanjutan. Potensi tambang yang dapat dimanfaatkan dan didayagunakan dengan tepat, dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan. Potensi tambang yang dihasilkan oleh Provinsi Kepulauan Riau dinilai berpengaruh besar bagi Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya. Potensi ini dinilai sangat menjanjikan guna mendorong ekonomi daerah di Kepulauan Riau.

### **Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau**

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi kepulauan yang menyimpan begitu banyak potensi serta keanekaragaman Sumber Daya Ekonomi, baik Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan, Jasa Transportasi Pelayaran dan Perdagangan, Wisata Bahari/Maritim, hingga Energi Berkelanjutan. Potensi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai modal utama pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Riau.

Berbagai Sumber Daya Ekonomi Kepulauan Riau dapat dijadikan sebagai salah satu terobosan dalam melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau yang masih terbilang cukup rendah. Dimana pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau masih sangat bergantung kepada Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Sehingga perlu dilakukannya beberapa upaya penguatan kapasitas Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau melalui penggalian Potensi Ekonomi yang telah tersedia.

Berdasarkan asumsi umum, terdapat pandangan bahwa hasil dari Pendapatan Asli Daerah selama ini dianggap masih belum mencukupi untuk membiayai pembangunan di daerah. Pemerintah daerah dinilai perlu mengadakan usaha-usaha lain untuk menambah sumber Pendapatan Daerahnya. Sesuai perkembangan kondisi saat ini, usaha yang lebih tepat dan memungkinkan untuk menambah sumber Pendapatan Daerah adalah melalui pengelolaan perusahaan dengan prinsip ekonomi berupa pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat ikut berperan dalam menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau. Meskipun demikian, pendirian

BUMD juga harus tetap terfokus pada penggalian berbagai Potensi Ekonomi Kepulauan Riau, seperti Industri Pengolahan Hasil Tambang, Investasi Pertambangan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Jasa Transportasi Pelayaran dan Perdagangan (Laut), Budidaya Perikanan, Pengolahan Produk Perikanan, Industri Bioteknologi Kelautan, Industri Sumber Daya Laut, dan usaha lainnya yang sesuai dengan potensi daerah.

Pada sisi lainnya, pendirian BUMD harus diposisikan sebagai badan usaha yang diupayakan menjadi penopang besar dalam meningkatkan PAD Kepulauan Riau. Sebenarnya, usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari pendirian BUMD telah berjalan sejak lama sebelum Undang-Undang tentang Otonomi Daerah disahkan. Perlu adanya upaya optimalisasi pendirian BUMD di Kepulauan Riau, yaitu dengan meningkatkan profesionalisasi, baik dari segi Manajemen Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai, sehingga BUMD memiliki posisi yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

Selain itu, strategi yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kepulauan Riau adalah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi berbagai Potensi Ekonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Intensifikasi berkaitan dengan suatu tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memperbesar Pendapatan Daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti (N & Riharjo, 2021). Sedangkan Ekstensifikasi merupakan usaha dari Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, baik melalui langkah perluasan atau penambahan jenis Pendapatan Daerah (N & Riharjo, 2021).

Strategi Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah di Kepulauan Riau dapat dilakukan dengan pengembangan aspek kelembagaan berupa penerapan sistem penempatan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah berdasarkan keahlian dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, terutama dalam upaya penggalian Potensi Ekonomi Kepulauan Riau. Selain dari aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan juga perlu diperhatikan terkait efisiensi dan efektivitas penggalian dan kontribusi Potensi Ekonomi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan

Riau. Sedangkan Strategi Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan menggali dan memanfaatkan berbagai Sumber Daya Ekonomi yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau dengan lebih optimal, sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kepulauan Riau memiliki Sumber Daya Ekonomi yang sangat potensial, sehingga perlu dilakukannya identifikasi terhadap berbagai Potensi Ekonomi Kepulauan Riau. Terdapat dua faktor utama yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi Potensi Ekonomi Daerah, yaitu sektor ekonomi yang unggul atau mempunyai daya saing yang kuat dan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan. Rencana Strategis yang telah direncanakan harus dapat terarah dengan tepat dalam menciptakan pengembangan pembangunan ekonomi di daerah. Meskipun demikian, strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat berbeda-beda antar-daerah. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki kondisi sosial ekonomi dan potensi sumber daya yang berbeda-beda pula.

## **PENUTUP**

Letak geografis dan Potensi Ekonomi Daerah merupakan faktor pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kepulauan Riau. Namun hal tersebut belum bisa dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pembukaan peluang usaha (BUMD) berbasis ekonomi daerah yang senada dengan Potensi Ekonomi Kepulauan Riau.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi saran dan masukan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerahnya, terutama dengan memperhatikan potensi-potensi Sumber Daya Ekonomi yang telah tersedia. Namun demikian, penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada pengkajian terkait strategi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya peningkatan PAD melalui Penggalian Potensi Ekonomi Daerah Kepulauan Riau. Perlu adanya penelitian lanjutan untuk mengkaji secara mendalam terkait strategi peningkatan PAD dengan

memperhatikan sektor lainnya yang potensial di Provinsi Kepulauan Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Kepulauan Riau. (2022) *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka (Kepulauan Riau Province in Figures) 2022*. Tanjungpinang: BPS Provinsi Kepulauan Riau.
- BPS Provinsi Kepulauan Riau. (2023) *Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka (Kepulauan Riau Province in Figures) 2023*. Tanjungpinang: BPS Provinsi Kepulauan Riau.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa (The Effect of Regional Local Revenue on Financial Performance of The Langsa City Government). *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(2), 164–174.
- Saputra, B., & Fernando, R. (2017). Kontribusi Sumber-Sumber PAD Dalam Mendukung Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(3), 1515-1534.
- Fauni, A. M., Anhar, H. D., & Sugiannor. (2021). Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin (Studi Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah) di Kotamadya Banjarmasin. *Repository Universitas Islam Kalimantan*, 27(3), 259–280.
- Hadi, M. (2020). Strategi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Jambura Economic Education Journal*, 2(2), 59–69. <https://doi.org/10.37479/jeej.v2i2.5633>
- Karismawan, P., Alwi, M., & Ismiwati, B. (2020). Analisis Potensi Ekonomi pada Setiap Kecamatan dalam Pengembangan Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Lombok Utara. *ELASTISITAS: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 192–198.
- Mebri, F. H., Suradinata, E., & Kusworo. (2022). Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 102–114. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2537>
- N, H. P. N., & Riharjo, I. B. (2021). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi di Kota Surabaya. *JIRA: Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–14.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *JDEP: Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30–45. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nasution, T., & Rahayu, E. N. P. (2023). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Studi 2020-2022). *ECo-Fin*, 5(2), 104–109. <https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.454>
- Nilawati, E. (2019). Analisis dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 9(1), 41–60. <https://doi.org/10.30588/jmp.v9i1.469>
- Novianti, R., M. Baga, L., & Falatehan, A. F. (2020). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi Sektor Pariwisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Wonosobo). *Jurnal Nasional Pariwisata*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jnp.59453>
- Pratama, A., Kusworo, & Priyono, B. (2021). Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(3), 541–553. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i3.475>

- Priatna, H., & Purwadinata, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(2), 62–74.
- Sambodo, B., & Putri, F. R. (2020). Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 10(1), 205–210.  
<https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.758>
- Sandi, D. H., Lukman, S., & Kawuryan, M. W. (2020). Analisis Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(3), 579–588.  
<https://doi.org/10.54783/jv.v12i3.301>
- Syapsan. (2019). Strategi Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 27(2), 231–241.
- Triarda, R., & Damayanti, R. (2021). Analisis Optimalisasi Potensi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 35–54.  
<https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.9350>
- Trisnawati, N. (2020). Strategi Kepala Dinas dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Sewa Alat Berat di UPTD Peralatan dan Perbengkelan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 159–179.
- Widiastuti, W., & Risandewi, T. (2020). Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Pemberdayaan Aset Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 17(2), 133–145.  
<https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v17i2.793>
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.